

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/psnp.15305>

## Pengaruh PNBP Pasca Produksi terhadap Pendapatan Nelayan Prigi

*The Impact of Post-Production Non-Tax State Revenue on the Income of Prigi Fishermen*

Difan Fauzan Adzim Awalul Ramadhan<sup>1</sup>, Aman Saputra<sup>2</sup>, Hery Choerudin<sup>3</sup>, Syarif Syamsuddin<sup>2</sup>, Eli Nurlaela<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>SMKN 1 Glagah, Banyuwangi, Jawa Timur

<sup>2</sup>Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Jl. AUP Pasar Minggu, Jakarta Selatan

<sup>3</sup>Institut Pertanian Bogor, Jl. Dramaga, Bogor, Jawa Barat

\*E-mail: elimumtaza@gmail.com

### ABSTRAK

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sumber daya perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan. Namun, salah satu titik kritis yang menimbulkan ketidaksetujuan di kalangan nelayan adalah dampak finansial yang signifikan terhadap pendapatan mereka, terutama karena penerapan kebijakan ini tanpa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan penerapan PNBP pasca produksi bagi kapal migrasi perijinan ke pusat, yang menjadi beban tambahan bagi nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pengaruh pembayaran PNBP pasca produksi terhadap pendapatan dan produktivitas nelayan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung pada KM. Tresna, kapal yang berdomisili di PPN Prigi, dan dianalisis menggunakan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan PPN Prigi yang telah memiliki izin pusat atau melakukan migrasi menjadi kapal pasca produksi merasakan dampak finansial dari penerapan kebijakan PIT, terutama saat harga ikan rendah dan kualitas hasil tangkapan menurun. Perbedaan keuntungan antara masa pra produksi dan pasca produksi cukup mencolok, di mana pada masa pra produksi keuntungan mencapai Rp6.559.726.643, sedangkan pada masa pasca produksi turun menjadi Rp1.583.033.298. Musim penangkapan juga mempengaruhi produktivitas, di mana selama masa transisi dari pra produksi ke pasca produksi pada Agustus-Desember 2023, kapal hanya beroperasi sebanyak 4 trip dengan total tangkapan rata-rata 3.657 kg, dibandingkan dengan 9 trip dan total tangkapan rata-rata 11.733 kg pada periode yang sama di tahun 2022.

Kata kunci: finansial, kesejahteraan, PIT

### ABSTRACT

The Measured Fishing Policy (PIT) aims to ensure the sustainability of fisheries resources while enhancing the welfare of fishermen. However, a critical point of contention among fishermen is the significant financial impact on their incomes, particularly due to the policy's implementation without fuel subsidies and the application of post-production Non-Tax State Revenue (PNBP) for vessels migrating their permits to the central authority, which adds an extra burden on fishermen at the Prigi National Fishery Port (PPN Prigi). This study seeks to identify the influence of post-production PNBPs on fishermen's income and productivity. Data collection was conducted through direct observation of KM. Tresna, a vessel based at PPN Prigi, and analyzed using descriptive methods.

The results indicate that PPN Prigi fishermen, who have obtained central permits or migrated to post-production vessels, experience a financial impact due to PIT policy implementation, especially during periods of low fish prices and diminished catch quality. A stark difference in profit was observed between the pre-production and post-production phases, with profits reaching Rp6,559,726,643 in the pre-production phase, which subsequently decreased to Rp1,583,033,298 in the post-production phase. Additionally, fishing seasons influence productivity, as evidenced during the August-December 2023 transition from pre-production to post-production, where the vessel only operated four trips with an average total catch of 3,657 kg, compared to nine trips and an average total catch of 11,733 kg in the same period in 2022.

Keywords: financial, measured fishing policy, welfare

## **Pendahuluan**

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) di Indonesia dirancang untuk mengoptimalkan keberlanjutan sumber daya perikanan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat nelayan. Dengan berfokus pada pengaturan kuota tangkapan, PIT bertujuan untuk memaksimalkan manfaat ekonomi dan sosial bagi nelayan serta memastikan kelestarian sumber daya ikan. Melalui pembatasan kuota, kebijakan ini diharapkan dapat mencegah praktik penangkapan ikan berlebihan dan menciptakan model pengelolaan yang lebih efektif dibandingkan kebijakan terdahulu yang berbasis izin kapal (Nurlaela, 2023; Trenggono, 2023). Namun, penerapan PIT tidak sepenuhnya bebas dari kontroversi, terutama terkait dampak finansial yang dirasakan oleh nelayan.

Salah satu keberatan utama yang muncul adalah penerapan PIT tanpa subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), yang meningkatkan beban ekonomi bagi nelayan, terutama bagi kapal yang beroperasi di atas 12 mil laut dan harus melakukan migrasi perizinan ke pusat. Penelitian menyebutkan bahwa penghapusan subsidi BBM dapat meningkatkan biaya operasional secara signifikan, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan nelayan (Firdaus & Hafsaridewi, 2017). Selain itu, kewajiban pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi bagi kapal yang melakukan migrasi perizinan ke pusat menambah tekanan ekonomi bagi nelayan, terutama di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi (Zulham et al., 2022).

Penelitian yang dilaksanakan di PPN Prigi ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan pembayaran PNBP pasca produksi terhadap pendapatan dan produktivitas nelayan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi wawasan mendalam tentang bagaimana kebijakan ini berdampak pada kesejahteraan nelayan serta bagaimana mereka menyesuaikan diri dengan perubahan akibat PIT (Bayyindah & Nurkhasanah, 2021; Picaulima et al., 2022).

Meskipun PIT berpotensi meningkatkan keberlanjutan sumber daya perikanan, tantangan ekonomi dan regulasi yang dihadapi nelayan perlu diperhatikan. Kebijakan yang lebih inklusif dan mempertimbangkan aspek ekonomi nelayan penting agar tujuan keberlanjutan dapat tercapai tanpa mengorbankan kesejahteraan mereka (Payong et al., 2021).

## **Bahan dan Metode**

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari hingga Mei 2024 di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi serta di KM. Tresna yang melakukan operasi penangkapan ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 573. Metode pengumpulan data mencakup observasi langsung pada KM. Tresna, wawancara dengan nelayan dan pemilik kapal, serta studi literatur dari berbagai sumber terkait. Alat yang digunakan dalam penelitian ini meliputi kapal *Purse Seine* serta peralatan seperti lembar kerja, alat tulis, kamera, dan kuisisioner yang dimiliki secara pribadi.

Data primer berupa hasil survei tentang pendapatan dan produktivitas nelayan sebelum dan sesudah perubahan mekanisme PNBP pasca produksi. Data sekunder mencakup data statistik dan laporan penelitian terdahulu mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan dan produktivitas nelayan. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif dan analisis finansial untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi kesejahteraan nelayan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa data sekunder dapat memberikan wawasan yang berharga mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pendapatan nelayan, termasuk biaya operasional, harga pasar, dan kebijakan pemerintah yang relevan (Suryawati et al., 2016).

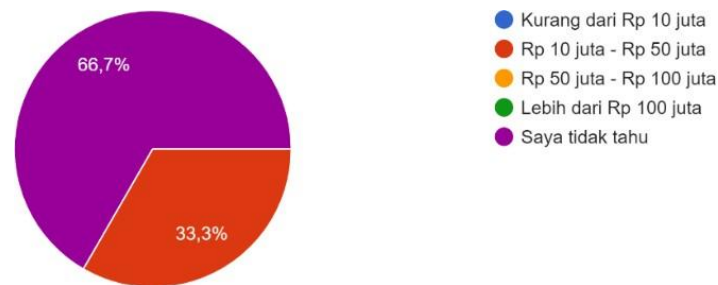
Pendekatan deskriptif dapat memberikan gambaran yang lebih jelas tentang dampak kebijakan terhadap produktivitas nelayan, serta faktor-faktor lain yang mungkin berkontribusi pada perubahan tersebut (Nirmasari & Bibin, 2022). Selain itu, analisis finansial yang dilakukan terhadap data sekunder dapat membantu dalam memahami dinamika pasar dan bagaimana kebijakan pemerintah dapat memengaruhi pendapatan nelayan secara keseluruhan (Adetama et al., 2023).

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Hasil**

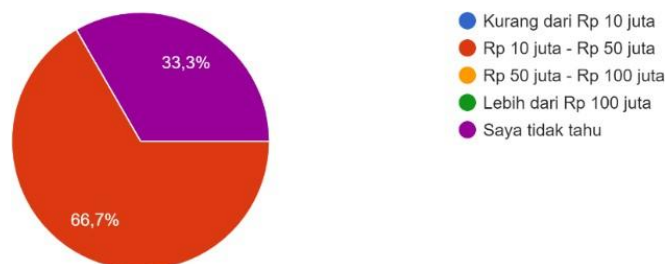
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pasca produksi memiliki pengaruh signifikan terhadap pendapatan dan produktivitas nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. PNBP ini merupakan kewajiban finansial yang harus dipenuhi nelayan setelah mereka melakukan produksi, yang dihitung berdasarkan jumlah dan nilai hasil tangkapan ikan. Banyak nelayan yang merasa terbebani oleh kewajiban finansial ini, terutama jika mereka tidak melihat manfaat langsung dari pembayaran tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh, perubahan mekanisme pembayaran dari pra produksi

menjadi pasca produksi memiliki dampak terhadap pendapatan tahunan nelayan di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Prigi. Sebelum perubahan mekanisme, 66,7% responden tidak mengetahui besaran pendapatan tahunan mereka, sedangkan 33,3% melaporkan pendapatan dalam kisaran Rp 10-50 juta. Setelah penerapan mekanisme pasca produksi, 66,7% responden melaporkan pendapatan tahunan sebesar Rp 10-50 juta, sementara 33,3% lainnya masih tidak mengetahui besaran pendapatan mereka. Data ini diilustrasikan pada Gambar 1 dan 2, yang menggambarkan perubahan dan persepsi nelayan terkait dampak kebijakan baru tersebut.



Gambar 1 Pendapatan Pra produksi Responden

Gambar 1 menunjukkan distribusi pendapatan nelayan responden sebelum penerapan kebijakan produksi atau PNBP pasca produksi. Mayoritas responden (66,7%) memiliki pendapatan dalam rentang Rp 10 juta hingga Rp 50 juta. Sementara itu, sisanya (33,3%) berada dalam rentang pendapatan kurang dari Rp 10 juta. Data ini menggambarkan bahwa pada periode pra produksi, sebagian besar nelayan masih mampu mencapai pendapatan yang relatif moderat, meskipun ada sejumlah nelayan yang berpendapatan lebih rendah. Kondisi ini mencerminkan situasi ekonomi nelayan sebelum diberlakukannya PNBP pasca produksi, di mana beban biaya operasional masih cukup rendah dan dampak dari kebijakan baru belum mempengaruhi stabilitas pendapatan mereka secara signifikan.



Gambar 2 Pendapatan Pasca Produksi

Gambar 2 mengilustrasikan pendapatan responden setelah penerapan kebijakan PNBP pasca produksi. Sama seperti sebelum kebijakan, sebagian besar responden (66,7%) berada pada rentang pendapatan Rp 10 juta hingga Rp 50 juta, sementara sisanya (33,3%) tetap berpendapatan di bawah Rp 10 juta. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pasca produksi tidak membawa peningkatan dalam distribusi pendapatan nelayan secara keseluruhan.

Analisis kelayakan usaha penangkapan ikan dilakukan melalui pendekatan finansial yang meliputi perhitungan pendapatan, keuntungan, *Revenue Cost Ratio* (R/C), *Payback Period* (PP), *Return on Investment* (ROI), dan *Break-Even Point* (BEP) (Kocu, 2023). Dalam analisis ini, biaya merupakan elemen penting yang perlu diperhitungkan, khususnya dalam konteks biaya investasi dan operasional. Biaya investasi adalah modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usaha, seperti pada KM. TRESNA yang mencakup biaya kapal, skiff boat, mesin, alat tangkap, dan alat navigasi, dengan total investasi awal sebesar Rp3.213.500.000 (Choerudin et al., 2022). Menurut Brigham dan Ehrhardt (2016), biaya investasi mencakup pengeluaran untuk pembelian aset tetap, seperti tanah, bangunan, mesin, dan peralatan, serta biaya lain yang terkait dengan pengoperasian usaha, seperti biaya pemasaran dan biaya administrasi.

Analisis laba per trip kapal perikanan digunakan untuk menghitung keuntungan bersih per trip dengan mempertimbangkan biaya tetap (*fixed cost*) dan biaya variabel (*variable cost*). Biaya tetap, seperti penyusutan dan perawatan, tidak bergantung pada volume produksi, sedangkan biaya variabel, seperti bahan bakar dan perbekalan, dipengaruhi oleh jumlah produksi. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah meskipun terjadi perubahan pada volume produksi, dan tetap dikeluarkan walaupun usaha tidak beroperasi (Sadarudin et al., 2023). Total biaya dalam suatu usaha adalah hasil penjumlahan antara biaya tetap dan biaya tidak tetap, yang dapat dinyatakan dalam rumus  $TC = TFC + TVC$ , di mana TC adalah total cost, TFC adalah total fixed cost, dan TVC adalah total variable cost (Ganda et al., 2022).

Tabel 1. Analisis Jangka Pendek Pada Tahap Pra Produksi

No	Keterangan	Nilai(Rp)
1	<b>Investasi</b>	
a	Kapal dan Sekoci	2.010.000.000
b	Permesinan dan Jenis	364.000.000

c	Alat Tangkap + Rumpon	740.000.000
d	Lampu	5.000.000
e	Peralatan Navigasi dan Keselamatan	94.500.000
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>3.213.500.000</b>
2	<b>Biaya Tetap</b>	
a	<b>SIUP</b>	<b>2.940.000</b>
3	<b>Penyusutan</b>	
a	Kapal dan Sekoci	46.900.000
b	Permesinan dan Jenis	25.480.000
c	Alat Tangkap	56.250.000
d	Rumpon	43.200.000
e	Lampu	2.500.000
f	Peralatan Navigasi dan Keselamatan	9.027.500
	<b>Jumlah Biaya Penyusutan</b>	<b>183.357.500</b>
4	<b>Perawatan</b>	
a	Kapal dan Sekoci	100.500.000
b	Permesinan dan Jenis	36.400.000
c	Alat Tangkap	25.000.000
d	Rumpon	12.000.000
e	Lampu	250
f	Peralatan Navigasi dan Keselamatan	4.725.000
	<b>Jumlah Biaya Perawatan</b>	<b>178.875.000</b>
	<b>Jumlah Biaya tetap</b>	<b>365.172.500</b>
5	<b>Biaya Tidak Tetap</b>	
a	Pelayanan Tambat Labuh, Kebersihan Kolam	3.925.950
b	Perbekalan (BBM dll)	1.126.350.000
c	PNBP Pra Produksi	2.870.000
d	Upah Awak Kapal	22.859.664
	<b>Jumlah Biaya Tidak Tetap</b>	<b>1.156.005.614</b>
	<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>	<b>1.521.178.114</b>
4	<b>Penerimaan</b>	<b>8.080.904.756</b>
	Produksi/Tahun(Kg)	482.442
	Harga jual per unit(Rp.000/Kg)	16.75
	Biaya Variabel per unit	2.396
5	<b>Keuntungan</b>	<b>6.559.726.643</b>
6	<b>Revenue cost ratio(R/C)</b>	<b>5,312</b>
7	<b>Return Of Investment(ROI)</b>	<b>204%</b>
8	<b>Payback Period(PP)</b>	<b>0,49</b>
9	<b>BEP berdasarkan unit(Kg)</b>	<b>25.441</b>
10	<b>BEP Berdasarkan nilai(Rp.000)</b>	<b>426.132.443</b>

Berdasarkan data pada Tabel 2, total investasi awal KM. TRESNA tercatat sebesar Rp3.213.500.000, yang mencakup biaya kapal dan sekoci, permesinan, alat tangkap, rumpon, lampu, serta peralatan navigasi dan keselamatan. Biaya tetap per tahun untuk operasi kapal ini mencakup biaya izin usaha (SIUP), penyusutan, dan perawatan yang

mencapai total Rp365.172.500. Biaya penyusutan dihitung sebesar Rp183.357.500 dan biaya perawatan sebesar Rp178.875.000, mencerminkan kebutuhan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk menjaga kualitas alat dan peralatan penangkapan. Di sisi lain, biaya tidak tetap yang meliputi biaya operasional seperti bahan bakar, pelayanan tambat labuh, perbekalan, upah awak kapal, dan PNBP pra produksi, mencapai Rp1.156.005.614. Total keseluruhan biaya operasional KM. TRESNA per tahun adalah Rp1.521.178.114.

Dari sisi penerimaan, total pendapatan per tahun tercatat sebesar Rp8.080.904.756, dengan keuntungan bersih sebesar Rp6.559.726.643. Revenue Cost Ratio (R/C) tercatat pada nilai 5,312, yang menunjukkan usaha ini layak dan menguntungkan karena nilai R/C lebih besar dari 1. Return on Investment (ROI) sebesar 204% menunjukkan bahwa usaha ini memberikan pengembalian investasi yang tinggi dalam setahun. Selain itu, nilai Payback Period (PP) sebesar 0,49 menunjukkan bahwa pengembalian modal investasi dapat tercapai dalam waktu sekitar 5 bulan 26 hari.

*Break Even Point* (BEP) dalam kilogram tercatat pada 25.441 kg, yang menunjukkan bahwa titik impas terjadi ketika produksi mencapai berat tersebut. BEP dalam rupiah sebesar Rp426.132.443 menunjukkan bahwa pendapatan yang harus dicapai untuk menutup biaya operasional adalah sebesar nilai ini. Berdasarkan hasil ini, dapat disimpulkan bahwa usaha penangkapan ikan KM. TRESNA layak untuk dilanjutkan karena memberikan keuntungan signifikan dan memiliki payback period yang relatif singkat.

Tabel 2. Analisis Jangka Pendek Pada Tahap Pasca Produksi

No	Keterangan	Nilai(Rp)
1	<b>Investasi</b>	
a	Kapal dan Sekoci	2.010.000.000
b	Permesinan dan Jenis	364.000.000
c	Alat Tangkap + Rumpon	740.000.000
d	Lampu	5.000.000
e	Peralatan Navigasi dan Keselamatan	94.500.000
	<b>Jumlah Investasi</b>	<b>3.213.500.000</b>
2	<b>Biaya Tetap</b>	
a	<b>SIUP</b>	<b>2.940.000</b>
3	<b>Penyusutan</b>	
a	Kapal dan Sekoci	46.900.000
b	Permesinan dan Jenis	25.480.000
c	Alat Tangkap	56.250.000
d	Rumpon	43.200.000
e	Lampu	2.500.000

f	Peralatan Navigasi dan Keselamatan	9.027.500
	<b>Jumlah Biaya Penyusutan</b>	<b>183.357.500</b>
4	<b>Perawatan</b>	
a	Kapal dan Sekoci	100.500.000
b	Permesinan dan Jenis	36.400.000
c	Alat Tangkap	25.000.000
d	Rumpon	12.000.000
e	Lampu	250
f	Peralatan Navigasi dan Keselamatan	4.725.000
	<b>Jumlah Biaya Perawatan</b>	<b>178.875.000</b>
	<b>Jumlah Biaya tetap</b>	<b>365.172.500</b>
5	<b>Biaya Tidak Tetap</b>	
	Pelayanan Tambat Labuh, Kebersihan	
a	Kolam	3.925.950
b	Perbekalan (BBM dll)	1.126.350.000
c	PNBP Pasca	474.019.140
d	Upah Awak Kapal	685.789.913
	<b>Jumlah Biaya Tidak Tetap</b>	<b>2.290.085.003</b>
	<b>Jumlah Biaya Keseluruhan</b>	<b>2.655.257.503</b>
4	<b>Penerimaan</b>	<b>4.238.290.800</b>
	Produksi/Tahun(Kg)	247.234
	Harga jual per unit(Rp.000/Kg)	17.143
	Biaya Variabel per unit	9.263
5	<b>Keuntungan</b>	<b>1.583.033.298</b>
6	<b>Revenue cost ratio(R/C)</b>	<b>1,596</b>
7	<b>Return Of Investment(ROI)</b>	<b>49%</b>
8	<b>Payback Period(PP)</b>	<b>2,03</b>
9	<b>BEP berdasarkan unit(Kg)</b>	<b>46.342</b>
10	<b>BEP Berdasarkan nilai(Rp.000)</b>	<b>794.426.980</b>

Berdasarkan data pada Tabel 2, total investasi awal KM. TRESNA tetap sebesar Rp3.213.500.000. Biaya tetap per tahun mencakup izin usaha (SIUP), penyusutan, dan perawatan, dengan total Rp365.172.500. Biaya penyusutan dan perawatan masing-masing tercatat sebesar Rp183.357.500 dan Rp178.875.000, menunjukkan adanya kebutuhan pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi operasional kapal dan alat tangkap. Pada kondisi pasca produksi, terdapat peningkatan signifikan pada biaya tidak tetap, yang meliputi biaya operasional seperti bahan bakar, perbekalan, upah awak kapal, dan tambahan PNBP. Total biaya tidak tetap mencapai Rp2.290.085.033, dengan pungutan hasil perikanan (PNBP) sebesar Rp474.019.140 sebagai beban tambahan yang berdampak pada total biaya keseluruhan. Jumlah total biaya operasional tahunan adalah Rp2.655.257.503.

Pendapatan tahunan yang dihasilkan menurun menjadi Rp4.238.293.800,



menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp1.583.033.298. Revenue Cost Ratio (R/C) tercatat sebesar 1,596, menunjukkan bahwa usaha ini masih layak karena R/C lebih besar dari 1, namun profitabilitasnya menurun dibandingkan pra produksi. Return on Investment (ROI) sebesar 49% mengindikasikan bahwa pengembalian investasi dalam setahun cukup rendah, dengan Payback Period (PP) meningkat menjadi 2,03 tahun atau sekitar 2 tahun 3 bulan 18 hari. Analisis Break-Even Point (BEP) menunjukkan bahwa titik impas dalam kilogram naik menjadi 46.342 kg, sedangkan dalam rupiah menjadi Rp794.426.980. Hal ini menunjukkan peningkatan jumlah produksi dan pendapatan yang diperlukan untuk mencapai titik impas. Secara keseluruhan, meskipun usaha KM. TRESNA masih layak dijalankan, peningkatan biaya operasional pasca produksi, khususnya PNBP, berpotensi mengurangi keuntungan nelayan di PPN Prigi dan memperpanjang waktu pengembalian modal.

Perbandingan antara tahap pra produksi dan pasca produksi menunjukkan adanya dampak signifikan dari kebijakan baru terhadap kondisi keuangan nelayan di PPN Prigi. Kebijakan ini menyebabkan peningkatan pungutan hasil perikanan (PHP) yang cukup drastis, yaitu dari Rp2.870.000 pada tahap pra produksi menjadi Rp474.019.140 pada tahap pasca produksi. Kenaikan pungutan ini berdampak langsung pada beberapa indikator finansial utama. Terjadi penurunan ROI yang menunjukkan berkurangnya tingkat keuntungan relatif terhadap modal yang diinvestasikan. Hal ini mengindikasikan penurunan efisiensi penggunaan modal. Peningkatan biaya operasional memperpanjang waktu pengembalian modal (Payback Period), yang pada gilirannya memperlambat perputaran investasi dan menambah beban bagi nelayan.

### **Pembahasan**

Salah satu dampak utama dari PNBP adalah pengurangan pendapatan bersih nelayan. Penelitian menunjukkan bahwa kewajiban pembayaran PNBP dapat mengurangi margin keuntungan nelayan, yang pada gilirannya mempengaruhi keputusan mereka dalam melakukan penangkapan ikan (Mustika, 2023). Hal ini menjadi perhatian utama, terutama bagi nelayan kecil yang sering kali beroperasi dengan margin yang sangat tipis. Namun, jika dana PNBP dikelola secara transparan dan akuntabel, ada potensi untuk menginvestasikan kembali dana tersebut ke dalam program-program yang bermanfaat bagi nelayan, seperti pelatihan, penyediaan alat tangkap yang lebih efisien, dan pengembangan infrastruktur yang mendukung kegiatan perikanan sersta dapat digunakan

untuk mendukung komunitas nelayan dalam bentuk fasilitas dan program yang meningkatkan produktivitas mereka (Darmin, 2023; Rahman et al., 2019).

Selain itu, pengelolaan yang baik dari dana PNBP dapat berkontribusi pada peningkatan produktivitas nelayan. Misalnya, investasi dalam fasilitas pengolahan hasil tangkapan dapat meningkatkan nilai tambah produk perikanan, sehingga meningkatkan pendapatan nelayan (Widiyowati et al., 2018). Penelitian juga menunjukkan bahwa program pemberdayaan yang didanai oleh PNBP dapat membantu nelayan dalam mengadopsi praktik perikanan yang lebih berkelanjutan dan efisien, yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil tangkapan mereka (Wijaya, 2023).

Namun, tantangan tetap ada dalam implementasi kebijakan PNBP ini. Oleh karena itu, penting untuk melibatkan nelayan dalam proses perencanaan dan pengelolaan dana PNBP, sehingga mereka dapat merasakan dampak positif dari kebijakan ini (Murobbi, 2023). Dengan demikian, meskipun PNBP pasca produksi dapat mengurangi pendapatan bersih nelayan, pengelolaan yang baik dan partisipatif dapat mengubahnya menjadi alat untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nelayan di PPN Prigi.

Analisis finansial KM. TRESNA pada tahap pra dan pasca produksi menunjukkan dampak signifikan dari kebijakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) terhadap profitabilitas dan kelayakan usaha penangkapan ikan. Pada tahap pra produksi, total investasi awal yang dikeluarkan adalah Rp3.213.500.000, mencakup kapal, permesinan, alat tangkap, dan peralatan keselamatan. Dengan total biaya tetap sebesar Rp365.172.500 dan biaya tidak tetap Rp1.156.005.614, total biaya operasional mencapai Rp1.521.178.114. Dalam kondisi pra produksi, KM. TRESNA mampu menghasilkan pendapatan tahunan Rp8.080.904.756 dengan keuntungan bersih Rp6.559.726.643. Nilai Revenue Cost Ratio (R/C) yang tinggi (5,312) dan Return on Investment (ROI) sebesar 204% menunjukkan kelayakan usaha yang baik, serta Payback Period (PP) yang singkat (0,49 tahun) mencerminkan efisiensi modal yang tinggi. Peningkatan PP dapat mengindikasikan risiko yang lebih tinggi bagi investor dan nelayan, yang dapat mempengaruhi keputusan untuk melanjutkan atau menghentikan usaha mereka (Sadarudin et al., 2023).

Namun, setelah kebijakan PNBP diberlakukan pada tahap pasca produksi, terjadi peningkatan signifikan pada biaya tidak tetap yang melonjak hingga Rp2.290.085.003. Kenaikan ini sebagian besar disebabkan oleh pungutan PNBP sebesar Rp474.019.140 dan

peningkatan upah awak kapal. Total biaya operasional tahunan meningkat menjadi Rp2.655.257.503. Akibatnya, pendapatan tahunan menurun menjadi Rp4.238.293.800, yang hanya menghasilkan keuntungan bersih sebesar Rp1.583.033.298. Penurunan ini tercermin dalam R/C yang turun menjadi 1,596 dan ROI yang berkurang drastis menjadi 49%, menunjukkan bahwa usaha tetap layak dijalankan namun mengalami penurunan profitabilitas.

Peningkatan waktu pengembalian modal atau PP dari 0,49 tahun pada pra produksi menjadi 2,03 tahun pada pasca produksi menandakan beban finansial yang lebih besar bagi nelayan. Selain itu, analisis *Break-Even Point* (BEP) menunjukkan peningkatan titik impas, baik dalam kilogram (dari 25.441 kg menjadi 46.342 kg) maupun dalam rupiah (dari Rp426.132.443 menjadi Rp794.426.980). Hal ini mengindikasikan bahwa usaha membutuhkan tingkat produksi dan penjualan yang lebih tinggi untuk mencapai titik impas. Perubahan dalam biaya tetap dan variabel dapat mempengaruhi BEP secara signifikan dalam usaha perikanan (Adhiatma et al., 2019).

Kebijakan PNBP pada tahap pasca produksi meningkatkan beban biaya operasional secara signifikan, yang berdampak langsung pada penurunan profitabilitas KM. TRESNA. Kebijakan ini dapat mengancam keberlanjutan usaha penangkapan ikan nelayan di PPN Prigi jika tidak disertai dengan dukungan subsidi atau kebijakan kompensasi lainnya untuk mengurangi beban finansial yang mereka hadapi. Dampak kebijakan ini perlu dievaluasi lebih lanjut untuk memastikan kesejahteraan ekonomi nelayan sekaligus menjaga kelestarian sumber daya perikanan. Menurut penelitian oleh (Rahman et al., 2019), kebijakan PNBP yang tidak diimbangi dengan dukungan subsidi atau kompensasi dapat menyebabkan penurunan pendapatan nelayan dan meningkatkan risiko kebangkrutan (Putera et al., 2019). Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi lebih lanjut mengenai dampak kebijakan ini terhadap kesejahteraan ekonomi nelayan.

### **Simpulan**

Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT) berdampak signifikan terhadap keuangan nelayan di PPN Prigi, terutama bagi kapal yang bermigrasi menjadi kapal pasca produksi. Keuntungan menurun dari Rp6.559.726.643 pada masa pra produksi menjadi Rp1.583.033.298 pada masa pasca produksi. Produktivitas juga berkurang, dengan

penurunan jumlah trip dan total tangkapan pada Agustus-Desember 2023 dibandingkan periode yang sama di tahun 2022.

### Daftar Pustaka

- Adetama, D. S., Fauzi, A., Juanda, B., & Hakim, D. B. (2023). Evaluasi Pembangunan Berkelanjutan Dengan Rendah Karbon Pada Sektor Pertanian Padi. *Jurnal Tataloka*, 25(1), 50–69. <https://doi.org/10.14710/tataloka.25.1.50-69>
- Adhiatma, A., Hidayat, R., Gusviandra, D., Rildiwan, R., Zulfandi, Z., Amrizal, A., & Batubara, F. Y. (2019). Rancang Bangun Dan Kinerja Mesin Pengupas Sabut Kelapa Muda. *Agroteknika*, 2(2), 85–94. <https://doi.org/10.32530/agroteknika.v2i2.40>
- Bayyinah, A. A., & Nurkhasanah, D. (2021). Status Alat Tangkap Jaring Kejer Di Cirebon, Jawa Barat. *Marine Fisheries Journal of Marine Fisheries Technology and Management*, 11(2), 135–146. <https://doi.org/10.29244/jmf.v11i2.32545>
- Choerudin, H., Muallim, R., Nurlaela, E., Sudrajat, D., & Hutajulu, J. (2022). Analisis Usaha Pukat Cincin (Purse Seine) Pada Km. Doa Restu-01 Di Perairan Gorontalo Utara, Gorontalo. *Buletin Jalanidhitah Sarva Jivitam*, 4(1), 1–10. <http://ejournal-balitbang.kkp.go.id/index.php/JSJ/index>
- Darmin, D. (2023). Pendekatan CEPA (Collaborative, Ecology, Planning, Administrative) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pesisir Pantai. *Jurnal Sipatokkong BPSDM Sulsei*, 4(2), 134–153. <https://doi.org/10.58643/sipatokkong.v4i2.229>
- Firdaus, M., & Hafsaridewi, R. (2017). Nilai Ekonomi Pemanfaatan Ikan Napoleon (Cheilinus Undulatus) Di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.15578/marina.v7i1.4589>
- Ganda, K. Y. A., Amanda, D., & Sehabudin, U. (2022). Struktur Biaya Dan Pendapatan Usaha Ternak Ayam Ras Pedaging Pola Kemitraan Makloon Di Kabupaten Sukabumi (Studi Kasus: Peternak Mitra PT. X). *Indonesian Journal of Agricultural Resource and Environmental Economics*, 1(1), 47–57. <https://doi.org/10.29244/ijaree.v1i1.41928>
- Kocu, L. V. (2023). Analisis Kelayakan Usaha Ikan Teri Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Perusahaan X Di Kota Sorong. *Akulturasi (Jurnal Ilmiah Agrobisnis Perikanan)*, 11(2), 459–467. <https://doi.org/10.35800/akulturasi.v11i2.51440>
- Murobbi, M. N. (2023). Analisis Optimalisasi Manajemen Ekonomi Pondok Pesantren Nurul Huda Kota Tangerang. *An-Natiq Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, 3(1), 16–32. <https://doi.org/10.33474/an-natiq.v3i1.19267>
- Mustika, I. (2023). Strategi Penghidupan, Manajemen Keuangan, Kerentanan Ekonomi, Dan Ketahanan Keluarga Nelayan. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 12(2), 269–279. <https://doi.org/10.23887/jish.v12i2.62017>
- Nirmasari, D., & Bibin, M. (2022). Strategi Peningkatan Kesejahteraan Nelayan Tradisional Di Kecamatan Wara Timur Kota Palopo. *Jurnal Sains Dan Teknologi Perikanan*, 2(1), 29–37. <https://doi.org/10.55678/jikan.v2i1.640>
- Nurlaela, E. (2023). Penangkapan Ikan Terukur: Tantangan Dan Penerapan. <https://doi.org/10.55981/brin.908.c759>
- Payong, V. F., Ilham, Muh., & Supriadi, B. (2021). Strategi Pengembangan Sektor Perikanan Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Flores

- Timur Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Visioner Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, 13(2), 187–196. <https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.425>
- Picaulima, S. M., Wiyono, E. S., Ngamel, A. K., Pentury, F., & Ngangun, T. A. (2022). Analisis Usaha Perikanan Purse Seine Skala Kecil Tipe Satu Dan Dua Kapal Dalam Zona Penangkapan Ikan Terukur Di WPP-NRI 714 Dan 718, Kepulauan Kei. *Jurnal Sumberdaya Akuatik Indopasifik*, 6(2), 89–102. <https://doi.org/10.46252/jsai-fpik-unipa.2022.vol.6.no.2.224>
- Putera, P., Intan, A., Mustaqim, F., & Ramadhan, P. (2019). Rancang Bangun Mesin Pengupas Sabut Kelapa. *Agroteknika*, 2(1), 31–40. <https://doi.org/10.32530/agtk.v2i1.31>
- Rahman, M. S., Toiba, H., & Efani, A. (2019). Pekerjaan Alternatif Sebagai Strategi Adaptasi Nelayan Terhadap Perubahan Iklim (Studi Kasus Di Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo). *Habitat*, 30(1), 1–7. <https://doi.org/10.21776/ub.habitat.2019.030.1.1>
- Sadarudin, S., Anwar, K., & Rosadi, N. A. (2023). Prospek Pengembangan Usaha Industri Tahu Di Desa Murbaya Kecamatan Pringgarata Kabupaten Lombok Tengah. *Jurnal Ekonomi Utama*, 2(1), 19–27. <https://doi.org/10.55903/juria.v2i1.34>
- Suryawati, S. H., Ramadhan, A., Zamroni, A., & Purnomo, A. B. (2016). Kebijakan Antisipatif Dalam Menghadapi Dinamika Harga BBM Pada Usaha Perikanan Tangkap. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 3(1), 189. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v3i2.327>
- Trenggono, S. W. (2023). Penangkapan Ikan Terukur Berbasis Kuota Untuk Keberlanjutan Sumber Daya Perikanan Di Indonesia. *Jurnal Kelautan Dan Perikanan Terapan (Jkpt)*, 1, 1. <https://doi.org/10.15578/jkpt.v1i0.12057>
- Widiyowati, E., Kriyantono, R., & Prasetyo, B. D. (2018). Dialog Dan Mediasi: Perspektif Komunikasi Konflik Dalam Strategi Manajemen Konflik (Studi Fenomenologi Terhadap Konflik Perguruan Pencak Silat Di Madiun – Jawa Timur). *Channel Jurnal Komunikasi*, 6(1), 33. <https://doi.org/10.12928/channel.v6i1.10210>
- Wijaya, A. (2023). Pemberdayaan Masyarakat Berupa Implementasi Web Profil Kesehatan & Manajemen Panti Asuhan Al-Ikhlas. *JMS*, 1(3), 202–208. <https://doi.org/10.62085/jms.v1i3.4>
- Zulham, A., Pramoda, R., & Shafitri, N. (2022). Pengorganisasian Nelayan Skala Kecil Di Zona Penangkapan Ikan Perikanan Industri Dalam Mendukung Rencana Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 8(2), 89. <https://doi.org/10.15578/marina.v8i2.11279>